

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuatan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik akan sangat berpotensi adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya. Akta Jaminan Fidusia pada prakteknya di Notaris dilakukan secara terus menerus dengan jumlah yang besar. Para penegak hukum berpendapat bahwa dalam pembuatan akta yang melebihi jumlah kewajiban terindikasi terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, pelanggaran ini berkaitan dengan aspek atau syarat formil dalam suatu akta autentik. Dengan diterapkannya pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara sentralistik oleh lembaga keuangan non bank, muncul beberapa dugaan pelanggaran yang mana terindikasi berpotensi dilakukan oleh Notaris, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- c. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.
- d. Pelanggaran terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Notaris.
- e. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jika indikasi atau dugaan pelanggaran yang terjadi dikarenakan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik terbukti, maka konsekuensi yuridis terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik adalah Akta

Jaminan Fidusia tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau Akta Jaminan Fidusia tersebut batal demi hukum. Sedangkan Konsekuensi Yuridis terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran di dalam perbuatan atau kegiatan melaksanakan pembuatan akta jaminan Fidusia secara sentralistik adalah:

- a. Jika dikarenakan Akta Jaminan Fidusia terdegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- b. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diberikan sanksi administratif yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berupa :
 - i. Peringatan tertulis;
 - ii. pemberhentian sementara;
 - iii. pemberhentian dengan hormat; atau
 - iv. pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur di dalam Kode Etik Notaris, yaitu berupa :
 - i. Teguran.
 - ii. Peringatan.
 - iii. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.
 - iv. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.

- v. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Keseluruhan sertifikat Jaminan Fidusia yang lahir melalui pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Ritel seharusnya dinyatakan batal demi hukum, dikarenakan Ritel tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Ritel tidak termasuk kepada subjek hukum, oleh karenanya Ritel tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.
3. Cara mengatasi akibat tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan Fidusia :
- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dengan mengundang masyarakat, lembaga keuangan non bank, Notaris, serta melakukan konsultasi ke daerah-daerah terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia Secara Sentralistik, ataupun ketika ada pertemuan di DKI Jakarta, selalu menganjurkan kepada lembaga keuangan non bank untuk menggunakan Notaris yang ada di daerah, agar akta yang dibuat lebih memiliki kepastian hukum dan tidak diragukan keautentikannya dan tidak terindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bekerjasama dengan lembaga keuangan non bank, karena hal tersebut akan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Notaris harus lebih mematuhi aturan tentang dunia kenotariatan baik aturan Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, contohnya aturan membuat akta maksimal 20 (dua puluh) akta per harinya yang tujuannya selain menciptakan kepastian hukum atas aktanya, juga adalah agar terciptanya pemerataan di kalangan notaris. Kementerian

Hukum dan Ham menyampaikan kepada lembaga keuangan non bank dan organisasi Notaris melalui sosialisasi dan konsultasi bahwa seharusnya ada koordinasi yang jelas terkait praktek Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berharap ada kerjasama antara notaris dan lembaga keuangan non bank agar aktanya dibuat tidak di pusat, baik berupa *MoU*, atau perjanjian kerjasama yang mengatur bahwa Akta Jaminan Fidusia dibuat dimana perjanjian pokoknya dibuat atau di daerah, agar terjadinya kesetaraan dan tidak terjadi penumpukan di pusat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengatasi pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini dalam bentuk memberikan himbauan-himbauan, sosialisasi dan konsultasi baik kepada lembaga keuangan non bank, kalangan Notaris dan masyarakat umum, karena dalam pembuatan akta Notaris ada kewajiban-kewajiban seperti keharusan pembacaan akta, kehadiran dan syarat formil lainnya yang tidak dikerjakan karena akta terlalu banyak. Jika ditemukan kesalahan dan ada pengaduan atau laporan terkait tidak dilaksanakannya kewajiban Notaris, maka Notaris tersebut dapat diberikan sanksi.

- b. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perbuatan sentralistik ini bertindak dengan melihat dan memeriksa perusahaan pembiayaan dari aspek kepatuhan dan profil risiko terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan perusahaan pembiayaan tidak melakukan pelanggaran dalam melakukan perbuatan sentralistik tersebut, karena secara regulasi Otoritas Jasa Keuangan tidak

melarang adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara sentralistik, karena sentralistik pun sebenarnya belum ada definisi hukumnya dalam hal Jaminan Fidusia, hal ini dikarenakan tidak ada norma pembuatan akta secara sentralistik, maka pihak pengawas di Otoritas Jasa Keuangan tidak *mengenforce* hal itu, kecuali di dalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu diatur maka pihak pengawas tentu akan *mengenforce* perbuatan tersebut, tetapi tidak ada pengaturan untuk itu. Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Jaminan Fidusia lebih kepada *mengenforce* apakah ada mitigasi risikonya atau tidak, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia. Ketika Otoritas Jasa Keuangan melihat ada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan terdapat Jaminan Fidusia dan perusahaan pembiayaan melakukan mitigasi risiko,

- c. Anggota Dewan Kehormatan Pusat Notaris menyampaikan terkait pembuatan akta jaminan Fidusia belum adanya keputusan yang jelas terkait hal ini. Dewan Kehormatan Pusat masih melakukan penilaian terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini agar tidak terjadi kekeliruan nantinya.
- d. Tindakan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengatasi perbuatan pembuatan akta jaminan Fidusia secara sentralistik yaitu:
 - i. Melakukan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas yang dilakukan secara berjenjang.

- ii. Melakukan pembinaan terhadap Notaris melalui himbauan-himbauan, konsultasi dan sosialisasi agar tidak mengerjakan pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran akta yang mana akan terindikasi adanya dugaan pelanggaran.
- iii. Melakukan perancangan dan pembuatan Peraturan Menteri yang akan menghapuskan syarat adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat agar dapat dilakukan pemeriksaan mendalam dan membawa Notaris yang diduga atau terindikasi melakukan dugaan pelanggaran untuk diadili oleh Majelis Pengawas Wilayah.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengerjakan dan menolak pembuatan Akta Notaris melebihi batas kewajaran Akta yang dapat dibuat dalam perharinya, agar menciptakan kepastian hukum untuk masyarakat yang membutuhkan jasa seorang Notaris karena Notaris seharusnya tidak membuat suatu akta yang dalam perbuatannya akan menimbulkan dugaan atau adanya indikasi pelanggaran.
2. Lembaga keuangan non bank seharusnya menghentikan *order* pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara sentralistik, karena hal tersebut dapat membuat Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang merupakan akta autentik menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum karena terindikasi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik.

3. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris harus segera melakukan penegakan hukum terkait sentralisasi Akta Jaminan Fidusia, dan harus segera berkoordinasi untuk mengawasi hal ini. Majelis Pengawas Notaris beserta Dewan Kehormatan Notaris harus segera menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atas berbagai peraturan perundang-undangan, yang akan menciptakan suatu kondisi dimana semua Notaris yang ada di seluruh Indonesia akan saling menghormati diantara satu dengan yang lainnya.
4. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik seharusnya mendapatkan perhatian dari semua kalangan yang terkait dengan Jaminan Fidusia, baik dari Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas. Diharapkan akan hadirnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatasi, mengawasi dan mengontrol Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik agar tidak terjadi lagi di kemudian hari karena akan merugikan pihak yang terkait dengan Akta Jaminan Fidusia.

